



Pemerintah Kabupaten
Bangka

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Presented By

**BAPPEDA KAB.
BANGKA**





**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

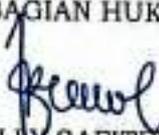
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELI SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

**RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan acuan untuk proses penyusunan anggaran tahun 2026. Mengacu kepada peraturan yang berlaku, Renja Bappeda tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda tahun 2024-2026, hasil evaluasi capaian Renja Bappeda tahun lalu dan tahun berjalan dan Peraturan Bupati Bangka No.13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Bappeda tahun 2026 memuat rencana operasional pencapaian sasaran Bappeda pada tahun 2026 melalui pelaksanaan 2 (dua) unsur penunjang urusan pemerintahan dan 4 (empat) program. Sebagai tahapan akhir dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, Renja Bappeda Tahun 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam pencapaian target kinerja Bappeda periode tahun 2024-2026. Dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2026 akan memberi dampak nyata untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Bappeda Tahun 2026.

Akhir kata, semoga dokumen Renja Bappeda Tahun 2026 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka demi Bangka yang lebih baik.

Sungailiat, 08 Agustus 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangka,



IR. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Analisis Kinerja Pelayanan OPD	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	56
3.3. Program dan Kegiatan	58
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	78
BAB V. PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Bangka Tahun 2024.....	8
Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2025	9
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Bangka	29
Tabel 2.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	32
Tabel 2.5. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda	34
Tabel 2.6. Telaahan Hasil Kebutuhan Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	37
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026	57
Tabel 3.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan Prioritas Propinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2026	58
Tabel 3.3. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sebaran Lokasi dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Dana	62
Tabel 3.4. Perbandingan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan Renja Bappeda Tahun 2026.....	63
Tabel 3.5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	64
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan mempedomani Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja. Rancangan awal Renja akan disempurnakan melalui hasil Forum Lintas Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja akan diverifikasi dan menjadi bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Bangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Dalam rangka menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju, Renja Bappeda Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026 juga memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, Renja Bappeda Tahun 2026 juga mempertimbangkan

perkembangan kondisi eksisting Bappeda, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Selanjutnya proses penyusunan Renja akan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel antara RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Setelah ditetapkan Renja Bappeda Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 42);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bappeda Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka pada Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangka secara berkesinambungan.

Sementara tujuan disusunnya Renja Bappeda Tahun 2026 adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Rencana Strategis Bappeda ke dalam Rencana Operasional Tahun 2026,
2. Tersedianya sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangka secara sistematis dan terorganisir,
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review Terhadap Renstra OPD.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;**
- BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Renja Bappeda ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2024.

Pada tahun 2024 Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 7.099.514.785,00 untuk pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 5.637.428.193,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100,00% dan capaian kinerja keuangan sebesar 79,41%.

Sementara pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2025 alokasi anggaran Bappeda adalah sebesar Rp. 6.255.965.127,00 untuk pelaksanaan 2 (dua) penunjang urusan pemerintahan, 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Selanjutnya sebagai tindaklanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dilaksanakan efisiensi atas beberapa belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2025 sehingga total pagu anggaran Bappeda Tahun 2025 mengalami koreksi menjadi sebesar Rp.5.690.276.461,00 dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tetap sama. Capaian kinerja diharapkan mencapai 100 persen.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian IKU

Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah	24,25	23,83	98,27
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	89,19	91,68	102,79

Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2024 telah baik. Capaian kinerja indikator nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKIP Daerah mencapai 98,27% dari target Renstra tahun 2024. Sementara hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah melampaui target Renstra Bappeda tahun 2024 sebesar 102,79%. Akan tetapi capaian ini tidak bersifat permanen. Apabila Bappeda tidak berhati-hati dalam mengendalikan pencapaian kerjanya maka dapat dipastikan capaian kinerja atas semua indikator tersebut dapat menurun atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara capaian atas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam evaluasi hasil pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu secara dapat dilihat dalam Tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan
Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun 2024		Realisasi Renja PD sampai Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01	Urusan Perencanaan												
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Nilai Kinerja Perencanaan kinerja Perangkat Daerah</i>	30,00	30,00	30,00		30,00		100		30,00	30,00	66,66
		<i>Nilai Kinerja Pelaporan kinerja Perangkat Daerah</i>	15,00	15,00	15,00		15,00		100		15,00	15,00	66,66
		<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>	0	0	0		0		100		0	0	66,66
		<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</i>	80,00	73,43	72,00		79,34		110,19		79,50	79,34	99,18

		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	N/a	3		4		133,33		4	4	66,66
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	100		100		100		100	100	66,66
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00	100	0,00	100%	100%	66,66
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100		100%	100%	66,66
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	40 Dokumen	18 Dokumen	14 Dokumen	0,00	14 Dokumen	0,00	100	0,00	28 Dokumen	28 Dokumen	70,00
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 Laporan	15 Dokumen	11 Dokumen	0,00	11 Dokumen	0,00	100	0,00	22 Laporan	22 Laporan	66,66

5.01.0 1.2.02	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	4.725.166.418	100%	3.909.822,906	100	82,74	100%	100%	66,66
5.01.01. 2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)	31 Orang	31 Orang/Bulan (17 Laki-Laki, 14 Perempuan)	4.703.238.288	31 Orang/Bulan (17 Laki-Laki, 14 Perempuan)	3.899.997.906	100	82,92	32 Orang/14 bulan Gaji (15 Laki-laki dan 17 Perempuan)	32 Orang/14 bulan Gaji (15 Laki-laki dan 17 Perempuan)	66,66
5.01.01. 2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	-	12 Dokumen	21.928.130,00	12 Dokumen	9.825.000,00	100	44,81	24 Dokumen	24 Dokumen	66,66
5.01.01. 2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan	-	42 Laporan	0,00	42 Laporan	0,00	100	0,00	84 Laporan	84 Laporan	66,66

5.01.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	100%	0,00	100%	0,00	100	0,00	100%	100%	66,66
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	100%		100%		100		100%	100%	66,66
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	50%		71,88%		143,76		50%	50%	71,88
5.01.01. 2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5 Paket	0	0 Paket	0,00	0 Paket	9.740.400,00	0	0,00	3 Paket	1 Paket	20,00
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	-	11 Dokumen	0,00	11 Dokumen	22.433.512,00	100	0,00	22 Dokumen	22 Dokumen	66,66
5.01.01. 2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang (15 orang laki-laki, 12 orang perempuan)	10 Orang	16 Orang	0,00	23 Orang	0,00	143,75	0,00	16 Orang (8 orang laki-laki, 48orang perempuan)	16 Orang	71,88
5.01.0 1.2.06	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	-	100%	525.925.758	100%	396.001.722	100	75,30	100%	100%	66,66

5.01.01. 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	-	12 Laporan	399.795.000	12 Laporan	322.195.132	100	80,59	24 Laporan	24 Laporan	66,66
5.01.01. 2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen	-	12 Laporan	30.121.748	12 Laporan	23.622.200	100	78,42	24 Dokumen	24 Dokumen	66,66
5.01.01. 2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	-	12 Laporan	96.009.010	12 Laporan	50.184.390	100	52,27	24 Dokumen	24 Dokumen	66,66
5.01.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	13,53%	-	1,23%	39.049.615	1,23%	35.845.125	100	91,82	5,35%	4,72%	34,88%
5.01.01. 2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	0 Unit	0 Unit	0%
5.01.01. 2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit	45 Unit	4 Unit	39.049.615	4 Unit	35.845.125	100	91,82	12 Unit	12 Unit	26,67
5.01.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di	100%	-	100%	477.210.216	100%	427.540.073	100	89,59	100%	100%	66,66

	Daerah	Perangkat Daerah											
5.01.01 2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	-	12 Laporan	351.124.266	12 Laporan	327.907.650	100	93,39	24 Laporan	24 Laporan	66,66
5.01.01 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	-	12 Laporan	84.882.890	12 Laporan	59.559.993	100	70,17	24 Laporan	24 Laporan	66,66
5.01.01 2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	-	12 Laporan	41.203.060	12 Laporan	40.072.430	100	97,26	24 Laporan	24 Laporan	66,66
5.01.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75%	-	75%	169.712.208	75%	117.833.068	100	69,43	75%	75%	66,66
5.01.01 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	-	7 Unit	138.112.208	7 Unit	110.338.718	100	79,89	6 Unit	6 Unit	66,66%

5.01.01 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	150 Unit	-	40 Unit	31.600.000	40 Unit	7.494.350	100	23,72	40 Unit	40 Unit	66,66
5.01.01. 2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	0	-	0	-	-	0 Unit	0 Unit	0%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	100	-	100	717.954.047	100	504.178.967	100	70,22	100	100	66,66
		<i>Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah</i>	100	-	100		100		100		100	66,66	
		<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti</i>	100	-	100		100		100		100	66,66	
5.01.02. 01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	100%		100%	443.145.935	100%	308.127.037	100	69,53	100%	100%	66,66

		Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi	100%	-	100%		100%		100		100%	100%	66,66
		Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) nasional	100%	-	100%		100%		100		100%	100%	66,66
5.01.02 2.01.01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen	-	2 Dokumen	91.144.000	2 Dokumen	52.355.276	100	57,44	3 Dokumen	3 Dokumen	75,00
5.01.02 2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	-	1 Dokumen	54.060.000	1 Dokumen	46.243.267	100	85,54	2 Dokumen	2 Dokumen	66,66

	Kebijakan Lainnya												
5.01.02 2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 BA	-	2 BA	27.681.740	2 BA	16.917.500	100	61,11	3 BA	3 BA	60,00
5.01.02 2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 BA	-	1 BA	29.825.230	1 BA	25.242.915	100	84,64	2 BA	2 BA	66,66
5.01.02 2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 BA	-	2 BA	47.814.965	2 BA	24.742.456	100	51,75	3 BA	3 BA	60,00
5.01.02 2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 Dokumen	-	3 Dokumen	192.620.000	3 Dokumen	142.625.623	100	74,05	5 Dokumen	5 Dokumen	62,50
5.01.0 2.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	-	100%	114.677.312	100%	74.044.165	100	64,57	100%	100%	66,66
		Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	100%	-	100%		100%		100		100%	100%	66,66

		Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	100%	-	100%		100%		100		100%	100%	66,66
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	9 Dokumen	-	3 Dokumen	70.694.232	3 Dokumen	46.897.525	100%	66,34	6 Dokumen	6 Dokumen	66,66
5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	204 Orang	-	68 Orang	43.983.080	68 Orang	27.146.640	100%	61,72	136 Orang	136 Orang	66,66
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	-	100%	160.130.800	100%	122.007.765	100%	76,19	100%	100%	66,66
		Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai	100%	-	100%		100%		100%		100%	100%	66,66

		ketentuan											
5.01.02. 2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	408 Laporan	-	136 Laporan	85.443.600	136 Laporan	65.178.867	100%	76,28	272 Laporan	272 Laporan	66,66
5.01.02. 2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	-	4 Dokumen	74.687.200	4 Dokumen	56.828.898	100%	76,09	7 Laporan	7 Laporan	70,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100	-	100	151.376.475	100	46.982.669	100	31.04	100	100	66,66
5.01.03. 2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan	100	-	100	66.313.395	100	16.363.902	100	24,68	100	100	66,66

		RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)											
5.01.03. 2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27 Dokumen	-	9 Dokumen	18.844.880	9 Dokumen	3.385.000	100	17,96	18 Dokumen	18 Dokumen	66,66
5.01.03. 2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	-	5 Laporan	31.461.075	5 Laporan	5.968.902	100	18,97	10 Laporan	10 Laporan	66,66
5.01.03. 2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	-	4 Dokumen	16.007.440	4 Dokumen	7.010.000	100	43,79	8 Dokumen	8 Dokumen	66,66

5.01.03. 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100	-	100	32.093.080	100	7.710.000	100	43,79	100	100	66,66
5.01.03. 2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	-	5 Dokumen	15.923.080	5 Dokumen	5.870.000	100	43,79	10 Dokumen	10 Dokumen	66,66
5.01.03. 2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	-	2 Dokumen	16.170.000	2 Dokumen	1.840.000	100	11,38	4 Dokumen	4 Dokumen	66,66

5.01.03. 2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100	-	100	52.970.000	100	22.908.767	100	43,25	100	100	66,66
5.01.03. 2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	-	5 Dokumen	27.300.000	5 Dokumen	18.133.267	100	66,42	10 Dokumen	10 Dokumen	66,66
5.01.03. 2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24 Dokumen	-	8 Dokumen	25.670.000	8 Dokumen	4.775.500	100	18,60	16 Dokumen	16 Dokumen	66,66

5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	100%	-	40%	293.120.048	40%	199.214.663	100%	67,96	50%	50%	50,00
		Indeks Inovasi Daerah	90,21	N/a	70,96		88,78		112,82		90,21	90,21	100
5.05.02.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	-	100%	139.340.048	100%	114.132.504	100	81,91	100%	100%	33,33%
5.05.02.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	N/a	2 Laporan	492.548.000	2 Laporan	359.649.666	100%	73.02%	3 Laporan	3 Laporan	75,00%
5.05.02.2.02.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan	100%	-	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	0%

5.05.02. 2.02.01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6 Dokumen	N/a	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0	0%	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.05.02. 2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	-	0%	0,00	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
5.05.02. 2.03.04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	-	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0	0%	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5.05.02. 2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	100%	-	89,24%	153.780.000	89,24%	85.082.159	100	55,33	94,75%	94,75%	94,75
5.05.02. 2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	-	1 Dokumen	153.780.000	1 Dokumen	85.082.159	100	55,33	2 Dokumen	2 Dokumen	66,66

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target pada tahun 2024 adalah :

- Sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial pada tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra.
- Sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan hingga tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra.
- Demikian juga dengan beberapa sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota belum memenuhi target, yaitu : sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya, sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya capaian kinerjanya masih akan 0 persen hingga tahun 2025.

2. Program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah :

- Pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat 4 (empat) indikator program yang memenuhi target kinerja, yaitu : 1) nilai kinerja perencanaan kinerja perangkat daerah, 2) nilai kinerja pelaporan kinerja perangkat daerah, 3) persentase temuan pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam LHP-BPK RI, dan 4) persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik.
- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu 1) Indeks kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, 2) Indeks pemenuhan data pembangunan daerah dan 3) Persentase rumusan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti. Capaian kinerja ke-3 indikator kinerja tersebut telah memenuhi

target yang ditetapkan. Demikian juga dengan kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam program ini seluruhnya telah memenuhi target kinerja.

- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan indeks kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah telah memenuhi target kinerja. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan.
- Untuk program penelitian dan pengembangan daerah terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah memenuhi target, yaitu persentase penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan daerah.

3. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Beberapa capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota terdapat 2 indikator kinerja yang melampaui target, yaitu 1) Indeks Profesionalitas Aparatur dengan target sebesar 72,00 dapat direalisasikan sebesar 79,34 (110,19%) dan 2) Indeks Kepuasan Jasa Pelayanan Internal dengan target 3 dapat direalisasikan sebesar 4 (133,33)
- Pada program penelitian dan pengembangan daerah terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target, yaitu : Indeks inovasi daerah dengan target 70,96 dapat direalisasikan sebesar 88,78 (112,82).
- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan juga melampaui target, yaitu realisasi kinerja sebesar 71,88 persen dari target sebesar 50,00 persen.
- Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi juga melampaui target. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 16 orang, dapat direalisasikan sebanyak 23 orang. Sub kegiatan ini dilaksanakan secara non budgeter.

Sementara berdasarkan perkiraan realisasi capaian target Renstra Bappeda sampai dengan tahun berjalan tahun 2025, capaian kinerja Bappeda sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota diperkirakan akan on the track sesuai dengan target Renstra Bappeda tahun 2024-2026. Walaupun demikian terdapat beberapa sub kegiatan yang diperkirakan akan tidak mencapai target kinerja sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2024-2025, yaitu :
 - Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya dengan target hingga tahun 2025 sebanyak 3 paket, diproyeksikan hanya akan terealisasi sebesar 1 paket (capaian kinerja 20 persen dari target akhir Renstra sebesar 5 Paket).
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 4 unit pada akhir periode Renstra, diproyeksikan tidak terealisasi (capaian kinerja 0 persen dari target akhir Renstra).
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan target hingga tahun 2025 sebanyak 30 unit, diproyeksikan hanya akan terealisasi sebesar 12 unit (26,67 persen dari target akhir Renstra sebesar 45 unit)
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya capaian kinerjanya masih akan 0 persen hingga tahun 2025.
2. Capaian kinerja program perencanaan, pengendalian dan evaluasi secara umum hingga tahun 2025 diproyeksikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2024-2026.
3. Capaian kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diproyeksikan akan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2024-2026.
4. Sementara untuk capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, capaiannya adalah sebagai berikut :
 - Persentase penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan daerah masih belum sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda. Sampai dengan tahun 2025 capaian kinerja indikator ini diperkirakan sebesar 50 persen atau baru mencapai 75 persen dari target tahun 2025.

- Indeks inovasi daerah sampai dengan tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda.

Terpenuhi dan terlampauinya target kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2024 antara lain disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Kapasitas aparatur Bappeda yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Kolaborasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dengan stakeholder terkait antara lain dalam pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan inovasi.

Sementara faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan adalah kebijakan pola minimal dalam pencapaian kinerja yang merupakan kebijakan yang muncul sebagai sebagai tindaklanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2023 dan dilanjutkan dengan terbitnya KMK nomor 38/KM.7/2023 tentang penyaluran bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023 yang masih memberikan efek terhadap kondisi fiskal Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2024.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut atas beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dalam pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2024 serta atas perkiraan realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025, Bappeda perlu melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan beberapa sub kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya sampai dengan tahun 2024 dalam Renja Bappeda Tahun 2026, yaitu sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan, sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atributnya, sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya apabila kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Bangka di tahun 2026 relatif memadai.

2. Terus mempertahankan dan/atau meningkatkan target kinerja atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah melampaui target kinerja sampai dengan pelaksanaan Renja Tahun 2025 melalui pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dimaksud dalam Renja Bappeda Tahun 2026. Hal ini didasari oleh kondisi bahwa tanpa pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dimaksud, capaian kinerja yang telah diperoleh berpotensi akan menurun capaiannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bangka menyelenggarakan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Unsur Perencanaan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun			Realisasi Tahun	Proyeksi Realisasi Tahun	
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah	24,25	24,75	25,25	23,83	24,75	25,25
2	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A(89,0)	AA (90,00)	AA (92,00)	91,68	AA (91,76)	AA (92,00)

Berdasarkan hasil pencapaian target kinerja Pelayanan Bappeda sampai dengan tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Kinerja pelayanan Bappeda tahun 2024-2026 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKIP daerah, dan 2) hasil evaluasi AKIP perangkat daerah.
2. Capaian kinerja nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKIP daerah pada tahun 2024 sebesar 23,83. Capaian tersebut belum memenuhi target kinerja tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 24,75.

3. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 91,68 dan telah melampaui target kinerja tahun 2024 akan tetapi belum mencapai target akhir Renstra Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tersebut diatas, beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh Bappeda dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026 adalah :

1. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan mendorong peningkatan nilai aspek kinerja perencanaan dalam AKIP Daerah sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan
2. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya meningkatkan hasil evaluasi AKIP Bappeda agar sesuai dengan target akhir Renstra Bappeda Tahun 2024-2026.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Pelayanan BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- g. Pembinaan UPT dan Jabatan Fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan hasil kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3, tingkat pelayanan Bappeda masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja Nilai Kinerja Aspek Perencanaan Dalam AKIP Daerah belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas perencanaan yang belum maksimal, yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penjenjangan/cascading kinerja dalam perencanaan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan logical frame work dan critical succes factor;
2. Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART;
3. Masih terdapat target kinerja yang belum selaras; dan
4. Pengukuran kinerja yang belum optimal dan belum mempergunakan teknologi informasi.

Selanjutnya kondisi-kondisi yang menjadi penyebab kurang maksimalnya kualitas perencanaan akan menjadi perhatian Bappeda dalam pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2026.

2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

No	Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	Masalah	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan yang belum optimal - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya konsisten - Waktu perencanaan yang terbatas - Terdapat perbedaan kepentingan terhadap proses perencanaan - Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka
2.	Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	Data dan informasi pendukung perencanaan yang belum sepenuhnya tersedia serta dimanfaatkan dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Sumber Daya Manusia - Terdapat beberapa penyedia data yang berbeda dengan metodologi yang berbeda untuk data yang sama
3.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya	Hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai umpan balik bagi perencanaan serta peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan periode selanjutnya	Komitmen pelaksana perencanaan yang belum maksimal

Secara struktur organisasi, struktur organisasi Bappeda saat ini berada bentuk yang relatif sesuai dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan. Keberadaan Sekretariat dan empat bidang (Bidang Sarana Prasarana, Bidang Sosial dan Ekonomi, Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan Bidang Penelitian dan Pengembangan) telah relatif sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Kebijakan Pemerintah Pusat berupa kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, telah ditindaklanjuti Bappeda dengan perubahan struktur organisasi. Perubahan ini

menyebabkan struktur organisasi yang lebih lentur dalam menyelaraskan tugas pokok dan fungsi pada level pengawas.

3. *Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan Terhadap Capaian Nasional/Internasional*

Renja Bappeda Tahun 2026 merupakan dokumen operasional tahunan pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen transisi setelah berakhirnya masa jabatan kepala Daerah pada tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dokumen RPD Tahun 2024-2026 disusun tanpa memasukkan unsur visi dan misi kepala daerah mengingat dalam periode tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Bangka akan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Hal ini menyebabkan analisis dampak isu-isu penting terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam Renja Bappeda Tahun 2026 tidak dapat dilaksanakan.

Sementara dampak isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda terhadap capaian program nasional dapat dilihat dari aspek :

1. Keselarasan perencanaan daerah terhadap perencanaan nasional, dan
2. Ketersediaan dukungan program daerah terhadap prioritas nasional

4. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda*

Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran, beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya peran Bappeda yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
2. Tingginya kepercayaan Bupati dan perangkat daerah terhadap keberadaan Bappeda dalam hal perencanaan hingga pengkoordinasian pembangunan daerah;
3. Kualitas SDM Bappeda yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;

4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
6. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah sesuai urusan yang dilaksanakannya, terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat, Propinsi dan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Propinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah. b. Dukungan Sumber Daya Manusia Bappeda dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
2.	Kebijakan pusat dalam ranah perencanaan yang sering berubah-ubah dan tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan Propinsi sebagai perpanjangan tangan pusat ke daerah
3.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran b. Dukungan Sumber Daya Manusia dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi c. Penerapan Kebijakan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
4.	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pemantauan perencanaan pembangunan secara berkala b. Pelibatan Pimpinan dalam pemantauan perencanaan pembangunan secara berkala c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan d. Penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

5. *Formulasi Isu-Isu Penting*

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Menyikapi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Bangka sebagai koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunan Renja perlu direncanakan dengan optimal. Proses penyusunan Renja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda saat ini, antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 yang masih menunggu hasil pemilihan ulang kepala Daerah Tahun 2025,
2. Peningkatan kesesuaian/keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP), kesesuaian antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah dan kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan sektoral,
3. Penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
4. Perkembangan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

Isu-isu penting tersebut akan mempengaruhi capaian kinerja tujuan dan sasaran Bappeda. Untuk itu perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026 perlu dilaksanakan untuk menjamin isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda terselesaikan dengan baik. Rumusan program dan kegiatan Bappeda dalam Renja Bappeda Tahun 2026, didorong untuk :

1. Menjamin pelaksanaan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan,
2. Mendukung pelaksanaan pengendalian penyusunan perencanaan dalam rangka menjamin kesesuaian antar perencanaan,

3. Mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berbasis SPBE, dan
4. Mendukung implementasi SIPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Rumusan Program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal Renja Bappeda Tahun 2026 dengan hasil analisa kebutuhan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Telaahan Hasil Kebutuhan Perangkat Daerah Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				9.873.886.640,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				6.690.416.744,00	
			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	30,00	33.075.000,00			Nilai Kinerja Perencanaan kinerja Perangkat Daerah	30,00	33.075.000,00	
			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	15,00				Nilai Kinerja Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	15,00		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	33.075.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	33.075.000,00	
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>14 Dokumen</i>	<i>16.537.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Sungailiat</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>13 Dokumen</i>	<i>16.537.500,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>11 Laporan</i>	<i>16.537.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Sungailiat</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>11 Laporan</i>	<i>16.537.500,00</i>	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00	7.413.695.410,00			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0,00	4.896.618.706,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100	7.413.695.410,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100	4.896.618.706,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)</i>	<i>6.659.973.100,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)</i>	<i>4.808.893.100,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>42.350.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>42.350.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>41 Laporan</i>	<i>45.375.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>41 Laporan</i>	<i>45.375.000,00</i>	

	<i>Semesteran SKPD</i>		<i>dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>			<i>Semesteran SKPD</i>		<i>dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>			
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	72				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	79,54		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	207.499.450.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100.615.000.00	
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%				Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%			
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%				Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%			
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket (Pakaian Olah Raga 50 Stel)</i>	<i>56.450.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>1 Paket (Pakaian Olah Raga 50 Stel)</i>	<i>56.450.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	<i>11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala,</i>	<i>44.165.000.00</i>	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	<i>11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala,</i>	<i>44.165.000.00</i>	

	<i>Kepegawaian</i>		<i>Kepegawaian</i>	<i>SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LH KPN, KP4)</i>		<i>Kepegawaian</i>		<i>Kepegawaian</i>	<i>SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LH KPN, KP4)</i>		
	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)</i>	<i>106.884.450,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)</i>	<i>0,00</i>	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	729.091.430.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	508.384.965,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>554.042.930.00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>385.044.465.00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>47.740.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>47.740.500,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>127.308.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>75.600.000,00</i>	

	<i>Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>		<i>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>			<i>Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>		<i>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>			
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,78%	220.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan aset perangkat daerah	4,78%	220.000.000,00	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>1 Unit Motor</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>1 Unit Motor</i>	<i>35.000.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>15 Unit</i>	<i>185.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</i>	<i>15 Unit</i>	<i>185.000.000,00</i>	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	735.856.600,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	514.557.549,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>563.915.450,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>371.826.680,00</i>	

	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>118.896.150,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>84.871.100,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>53.045.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>57.859.769,00</i>	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	75%	534.668.750,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	75%	417.165.524,00	
	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>4unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda Dua</i>	<i>246.540.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>4unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda Dua</i>	<i>145.405.524,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>40 Unit</i>	<i>38.128.750,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>40 Unit</i>	<i>21.760.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>1 Unit</i>	<i>250.000.000,00</i>	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.437.376.461,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				671.308.000,00	
			Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100				Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100		
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	100	1.579.567.500,00	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	100	370.660.000,00	
			Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi	100				Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi	100		
			Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100				Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100		
	<i>Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai)</i>	<i>2 Dokumen (Rancangan RPJMD dan Rancangan</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai)</i>	<i>2 Dokumen (Rancangan RPJMD dan Rancangan</i>	<i>24.150.000,00</i>	

	<i>Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>		<i>Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	<i>RKPD)</i>		<i>Isu Strategis Pembangunan Daerah</i>		<i>Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	<i>RKPD)</i>		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>79.567.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>54.300.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	<i>2 Berita Acara (BA Konsul Publik RKPD dan Konsul Publik RPJMD)</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>	<i>2 Berita Acara (BA Konsul Publik RKPD dan Konsul Publik RPJPD)</i>	<i>39.060.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>1 Berita Acara LPD RKPD</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>1 Berita Acara LPD RKPD</i>	<i>28.170.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>2 Berita Acara (BA Musrenbang RPJMD, BA Musren RKPD)</i>	<i>550.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	<i>2 Berita Acara (BA Musrenbang RPJMD, BA Musren RKPD)</i>	<i>119.590.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3 Dokumen (RPJMD, RKPD, Perubahan RKPD)</i>	<i>795.000.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3 Dokumen (RPJMD, RKPD, dan Perubahan RKPD)</i>	<i>105.390.000,00</i>	

			Indeks kualitas Data perencanaan pembangunan daerah	100				Indeks kualitas Data perencanaan pembangunan daerah	100		
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	450.953.811,00	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	122.680.000,00	
			Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	100%				Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	100%		
			Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	100%				Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	100%		
	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sungailiat, Bangka	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	281.137.500,00	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sungailiat, Bangka	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	64.700.000,00	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Sungailiat, Bangka	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	68 Orang	169.816.311,00	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Sungailiat, Bangka	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	68 Orang	57.980.000,00	

			<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti</i>					<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti</i>			
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	406.855.150,00	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	177.968.000,00	
			Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%				Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%		
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	<i>136 Laporan</i>	<i>270.529.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	<i>136 Laporan</i>	<i>96.528.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>136.325.650,00</i>	<i>Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>81.440.000,00</i>	

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100	403.142.000,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100	469.130.000,00	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100%	148.526.000,00	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100%	198.523.500,00	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>53.045.000,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>53.045.000,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat</i>	<i>5 laporan</i>	<i>26.522.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat</i>	<i>5 laporan</i>	<i>76.560.000,00</i>	

	<i>Bidang Pemerintahan</i>		<i>Daerah Bidang Pemerintahan</i>			<i>Bidang Pemerintahan</i>		<i>Daerah Bidang Pemerintahan</i>			
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i> <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>68.958.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>68.958.500,00</i>	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPd dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100 %	137.917.000,00	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPd dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100 %	137.917.000,00	

	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>68.958.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>68.958.500,00</i>	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>68.958.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>68.958.500,00</i>	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100%	116.699.000,00	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100%	132.649.500,00	
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>58.349.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>74.300.000,00</i>	

	<i>Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		<i>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>			<i>Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>		<i>Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>			
	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>58.349.500,00</i>	<i>Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>58.349.500,00</i>	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				572.478.350,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				467.357.100,00	
			Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	100%				Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	100%		
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	132.898.550,00	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	108.030.000,00	

	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>132.898.550,00</i>	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>108.030.000,00</i>	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	160.800.650,00	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	160.800.650,00	
	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>160.800.650,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>160.800.650,00</i>	
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	84.936.450,00	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	84.936.450,00	
	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>Sungailiat, Bangka</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>84.936.450,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>84.936.450,00</i>	
			Indeks Inovasi Daerah	90,21				Indeks Inovasi Daerah	90,21		

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	100%	193.842.700,00	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	100%	113.590.000,00	
<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>193.842.700,00</i>	<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>113.590.000,00</i>	
JUMLAH				13.286.883.451,00	JUMLAH				8.298.211.844,00	

Berdasarkan telaahan antaran rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan perangkat daerah terdapat beberapa perbedaan antara rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan perangkat daerah, yaitu :

- a. Jumlah pagu hasil analisis kebutuhan perangkat daerah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan rancangan awal RKPD. Pagu rancangan awal RKPD sebesar Rp. 13.286.883.451,00. Setelah dilaksanakan analisis kebutuhan perangkat daerah dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan kebijakan efisiensi dalam rangka pencapaian tujuan kinerja perangkat daerah, maka pagu yang dibutuhkan oleh Bappeda dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 8.298.211.844,00.
- b. Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang berdasarkan hasil analisis dapat dilaksanakan secara nonbudgeter, yaitu sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- c. Lokasi dan target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak mengalami perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat dalam Renja Bappeda Tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Berdasarkan Misi Prioritas dan Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Bangka mendukung kebijakan nasional 2025-2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional ke-1 Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasional Meningkatkan serta mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas ke-3 Reformasi Hukum, Politik dan Birokrasi yang diimplementasikan melalui pelaksanaan peningkatan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan anatara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024-2026 yaitu :

- 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**
- 2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor maka dirumuskan kondisi-kondisi (sasaran) yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan “**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**” adalah : **meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan**. Sedangkan sasaran untuk tujuan “**Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**” adalah : **meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**.

Selanjutnya, sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bappeda setiap tahunnya. Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Bangka pada tahun 2026 sesuai Renstra Bappeda 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2026
I.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas		Indeks Kualitas Perencanaan	8,91
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah	25,25
II	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	34,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	AA (92,83)

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3 (tiga) prioritas, yaitu : 1) Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, 2) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Secara Berkelanjutan, dan 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi;
2. Kesejahteraan dan Perlindungan Nasional;
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan Industri dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru); dan

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 terhadap prioritas pembangunan propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Bangka
dengan Prioritas Propinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Propinsi	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan Bappeda	Indikator Tujuan	Sasaran Bappeda	Indikator Sasaran
1.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Birokrasi	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan Dalam AKIP Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja Bappeda Tahun 2026 didasarkan pada :

1. Renstra Bappeda Tahun 2024-2026,
2. Perkembangan terkait hasil Pilkada Serentak Kabupaten Bangka Tahun 2024,
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka nomor : B-000.7.5/116/Bappeda-V/2025 tentang Penyusunan Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappeda Tahun 2026 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang juga terdapat dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Akan tetapi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan dalam Renja dipengaruhi oleh beberapa hal lain. Hasil Pilkada serentak Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang dimenangkan oleh kotak kosong mengharuskan

Bappeda untuk melakukan penyesuaian terhadap tahapan penyusunan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 dan berimplikasi kepada output sub kegiatan yang tidak sesuai dengan target Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 di tahun 2026. Selain itu proyeksi fiskal Kabupaten Bangka pada tahun 2026 yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk menetapkan besaran pagu anggaran setiap perangkat daerah juga mempengaruhi rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam Renja Tahun 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Bappeda Tahun 2026 merupakan operasionalisasi dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda serta dukungan terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana diuraikan pada sub bab diatas. Efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.3.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mengacu kepada surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka nomor : B-000.7.5/116/Bappeda-V/2025, Bappeda Kabupaten Bangka mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.943.644.080,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah). Besaran pagu tersebut selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda pada tahun 2026. Terdapat 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappeda Tahun 2026. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja Bappeda Tahun 2026 telah sesuai dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 serta telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 yang telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Bangka, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan SKPD**
- Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- b. Kegiatan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Selanjutnya, berdasarkan sebaran lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan di tempat kedudukan kantor Bappeda Kabupaten Bangka, yaitu di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Sementara berdasarkan sumber pendanaan, dari total pagu indikatif sebesar Rp. 6.943.644.080,00, sebesar 81,55 persen atau Rp. 5.662.747.523,00 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebesar 18,45 persen atau sebesar Rp. 1.280.896.557,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Renja Bappeda Tahun 2026 tidak terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang didanai oleh sumber dana lainnya. Detail rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, sebaran lokasi dan total pagu indikatif berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sebaran Lokasi dan Total Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	
1.	Jumlah	4 (empat)	14 (empat belas)	27 (dua puluh tujuh)	
2	Sebaran Lokasi	4 Program di Sungailiat Kab. Bangka	14 Kegiatan di Sungailiat Kab. Bangka	27 Sub Kegiatan di Sungailiat Kab. Bangka	
3	Total Pagu Indikatif Berdasarkan Sumber Dana	DAU	5.662.747.523,00	5.662.747.523,00	5.662.747.523,00
		DAK	0,00	0,00	0,00
		PAD	1.280.896.557,00	1.280.896.557,00	1.280.896.557,00

3.3.3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappeda tahun 2026 mengalami penyesuaian jika dibandingkan dengan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka tahun 2026. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dan Renja Bappeda Tahun 2026

No	Uraian	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	Renja Tahun 2026
1.	Total Pagu Anggaran	Rp. 13.286.883.451,00	Rp. 6.943.644.080,00
2.	Jumlah Program	4 (empat)	4 (empat)
3.	Jumlah Kegiatan	18 (Delapan belas)	14 (Tiga belas)
4.	Jumlah Sub kegiatan	42 (Empat puluh dua)	27 (Dua puluh tujuh)

Perbedaan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 dibandingkan dengan Renja Bappeda Tahun 2026 disebabkan oleh adanya penyesuaian besaran pagu dalam Renja Bappeda yang lebih rendah dibandingkan dengan pagu rancangan awal Renja Bappeda Tahun 2026. Proyeksi fiskal Kabupaten Bangka pada tahun 2026 relatif lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi fiskal dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sehingga besaran pagu anggaran pada Renja perangkat daerah juga akan mengalami penurunan dibandingkan dengan pagu pada rancangan awal RKPD. Penyesuaian besaran pagu Renja perangkat daerah mengacu pada surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka nomor: B-000.7.5/116/Bappeda-V/2025 yang telah memperhitungkan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Bangka terbaru.

3.3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 3.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target CapaianKinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.943.644.080,00				7.301.053.094,00
5.01	PERENCANAAN				6.722.024.080,00				7.057.271.094,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.792.866.080,00				6.139.748.294,00
		<i>Nilai Kinerja Perencanaan kinerja Perangkat Daerah</i>		30,00	0,00			30,00	0,00
		<i>Nilai Kinerja Pelaporan kinerja Perangkat Daerah</i>		15,00			15,00		
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Sungailiat	100%	0,00			100%	0,00

	Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
5.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Sungailiat, Kab. Bangka	14 Dokumen 1. Dokumen Renja, 2. Dokumen Perubahan Renja, 3. Perkin, Perubahan Perkin, 4. Dokumen Rencana Aksi, 5. Dokumen PPAS, 6. Dokumen Perubahan PPAS, 7. Dokumen RKA, 8. Dokumen Perubahan RKA, 9. Dokumen GAP, 10. Dokumen GBS, 11. Dokumen Resiko, 12. Dokumen DPA, 13. Dokumen DPPA, 14. Dokumen Renstra Bappeda 2025-2029	0,00	Dana Alokasi Umum	P1	13 Dokumen Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Perkin, Perubahan Perkin, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan PPAS, Dokumen RKA, Dokumen Perubahan RKA, Dokumen GAP, Dokumen GBS, Dokumen Resiko, Dokumen DPPA,	0,00
5.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Sungailiat, Kab. Bangka	11 Laporan (1 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Laporan LKPJ Perangkat Daerah, 4 Laporan Evaluasi	0,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Laporan (1 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, 1 Laporan LKPJ Perangkat Daerah, 4 Laporan Evaluasi	0,00

		<i>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		<i>Renja, 4 Laporan Evaluasi Rencana Aksi, 1 Laporan Pelaksanaan GAP dan GBS)</i>				<i>Renja, 4 Laporan Evaluasi Rencana Aksi, 1 Laporan Pelaksanaan GAP dan GBS)</i>	
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%				0%	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar		100%	4.417.023.100,00			100%	4.808.893.706,00
5.01.01.2.02.0001	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Sungailiat, Kab. Bangka</i>	<i>43 Orang/14 bulan Gaji (23 Laki-laki dan 20 Perempuan)</i>	<i>4.417.023.100,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>43 Orang/14 bulan Gaji (23 Laki-laki dan 20 Perempuan)</i>	<i>4.808.893.706,00</i>
5.01.01.2.02.0003	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Sungailiat, Kab. Bangka</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>0,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>0,00</i>
5.01.01.2.02.0007	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD</i>	<i>Sungailiat, Kab. Bangka</i>	<i>41 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan</i>	<i>0,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>41 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan</i>	<i>0,00</i>

				<i>Bulanan, 2 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)</i>				<i>Bulanan, 2 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)</i>	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		79.54				80,00	
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Sungailiat	100%	9.750.000,00			100%	56.450.000,00
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100%				100%	
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		50%				50%	
5.01.01.2.05.0002	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>1 Paket</i>	<i>9.750.000,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>2 Paket</i>	<i>56.450.000,00</i>
5.01.01.2.05.0003	<i>Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan,</i>	<i>0,00</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan,</i>	<i>0,00</i>

				<i>Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)</i>				<i>Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)</i>	
5.01.01.2.05.0009	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan nonformal</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)</i>	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)</i>	0,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		4				4	
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah		100%	425.640.423.00			100%	468.204.465.00
5.01.01.2.06.0009	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berkenaan</i>	<i>Kab. Bangka dan Luar Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	350.040.423.00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Laporan</i>	385.044.465,00
5.01.01.2.06.0010	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>12 Dokumen</i>	0,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Dokumen</i>	0,00
5.01.01.2.06.0011	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Kab. Bangka</i>	<i>12 Dokumen</i>	75.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>P1</i>	<i>12 Dokumen</i>	83.160.000,00
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%	0,00			100%	0,00

5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah		4,56%	523.334.950,00			4,56%	113.813.940,00
5.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bangka	1 Unit	428.490.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	-	0,00
5.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Bangka	15 Unit	94.844.950,00	Dana Alokasi Umum	P1	15 Unit	113.813.940,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		4				4	
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah		100%	192.248.767,00			100%	523.044.659,00
5.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	12 Laporan	95.456.535,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	371.826.680,00
5.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	84.871.100,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	93.358.210,00
5.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangka	12 Laporan	11.921.132,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Bulan	57.859.769,00

		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%				100%	
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		75%	224.868.840,00			75%	169.341.524,00
5.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Bangka	4 unit Kendaraan Roda Dua, 2 Unit Kendaraan Roda Dua	131.598.840,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 unit Kendaraan Roda Dua, 2 Unit Kendaraan Roda Dua	145.405.524,00
5.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bangka	40 Unit	21.760.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	40 Unit	23.936.000,00
5.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Bangka	1 Unit	71.510.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	-	0,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				776.408.000,00				702.802.800,00
		Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah		100				100	

5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan		100%	483.260.000,00			100%	372.090.000,00
		Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi		100%				100%	
		Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)		100%				100%	
5.01.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kab. Bangka	1 Dokumen (Rancangan Awal RKPD)	24.150.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen (Rancangan Awal RKPD)	26.565.000,00
5.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka	1 Dokumen	54.300.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	59.730.000,00

5.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Bangka	2 Berita Acara (BA Konsul Publik RKPd dan Konsul Publik RPJMD)	39.060.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Berita Acara (BA Konsul Publik RKPd)	31.248.000,00
5.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Bangka	1 Berita Acara LPD RKPd	28.170.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 BA LPD RKPd	30.987.000,00
5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bangka dan Luar Daerah	2 Berita Acara (BA Musrenbang RPJMD, dan BA Musrenbang RKPd)	114.590.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Berita Acara (BA Musrenbang RKPd)	107.631.000,00
5.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPd)	Kab. Bangka dan Luar Daerah	3 Dokumen (RPJMD, RKPd, Perubahan RKPd)	222.990.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Dokumen (RKPd dan Perubahan RKPd)	115.929.000,00
		Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah		100%				100%	
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan		100%	115.180.000,00			100%	134.948.000,00
		Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia		100%				100%	

		Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA		100%				100%	
5.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bangka	3 Dokumen (RAD SDG's, Laporan Penanggulangan Kemiskinan, Data Tabular Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)	59.700.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Dokumen	71.170.000,00
5.01.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Bangka	68 Orang	55.480.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	68 Orang	63.778.000,00
		Persentase Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti		100%				100%	
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan		100%	177.968.000,00			100%	195.764.800,00
		Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan		100%				100%	

5.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangka	136 Laporan	96.528.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	136 Laporan	106.180.800,00
5.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Bangka	3 Laporan	81.440.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	3 Laporan	89.584.000,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				152.750.000,00				214.720.000,00
		<i>Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah</i>		100				100	
5.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)		100%	69.600.000,00			100%	76.560.000,00

5.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bangka	5 Laporan	55.500.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Laporan	76.560.000,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)		100%	37.050.000,00			100%	56.430.000,00
5.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangka	5 Dokumen	37.050.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	56.430.000,00
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen		100%	60.200.000,00			100%	81.730.000,00

		perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)							
5.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Bangka	5 Dokumen	60.200.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Dokumen	81.730.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				221.620.000,00				243.782.000,00
		<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah</i>							
5.05.02.2.01.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi		100%	108.030.000,00			100%	118.833.000,00

		Rekomendasi Perumusan Kebijakan							
5.05.02.2.01.0012	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Kab. Bangka	1 Laporan	108.030.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Laporan	118.833.000,00
		Indeks Inovasi Daerah		90,21				90,21	
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan		100	113.590.000,00			100	124.949.000,00
5.05.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bangka	1 Dokumen	113.590.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	124.949.000,00
JUMLAH					6.943.644.080,00				7.301.052.094,00

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026, Rencana Kerja dan Pendanaan tahun Bappeda Tahun 2026 disusun berdasarkan :

- a. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- b. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026;
- c. Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka nomor: B-000.7.5/116/Bappeda-V/2025 tentang Penyusunan Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Prioritas Nasional	Prioritas Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.943.644.080,00							7.301.053.094,00	
5.01	PERENCANAAN				6.722.024.080,00							7.057.271.094,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				5.792.866.080,00							6.139.748.294,00	
		<i>Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah</i>	30,00	30,00							30,00		
		<i>Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah</i>	15,00	15,00							15,00		
		<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>	0%	0%							0%		
		<i>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat</i>	72,00	79.54							80,00		

		<i>Daerah</i>											
		<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah</i>	<i>4</i>	<i>4</i>							<i>4</i>		
		<i>Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>							<i>100%</i>		
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	100%	100%	4.417.023.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	100%	4.808.893.706,00	
5.01.01.2.02.00.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/14 Bulan	43 Orang/14 bulan)	4.417.023.100,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	43 Orang/14 bulan Gaji (23 Laki-laki dan 20 Perempuan)	4.808.893.706,00	BAPPEDA
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	100%	100%	9.750.000.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	100%	56.450.000.00	
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%							100%		

		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50%	50%				Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Birokrasi		50%		
5.01.01.2.05.00.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	5 Paket	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	2 Paket	56.450.000,00	BAPPEDA
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%	100%	425.640.423.00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	100%	468.204.465.00	
5.01.01.2.06.00.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berkenaan	36 Laporan	12 Laporan	350.040.423.00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	12 Laporan	385.044.465,00	BAPPEDA
5.01.01.2.06.00.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Laporan	12 Dokumen	75.600.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan	12 Dokumen	83.160.000,00	BAPPEDA

								<i>Narkoba, Judi dan Penyelundupan</i>	<i>Kapasitas Birokrasi</i>	<i>20 Orang)</i>			
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	13,35%	4,56%	523.334.950,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	4,56%	113.813.940,00	
5.01.01.2.07.00.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	428.490.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	0 Unit	0,00	BAPPEDA
5.01.01.2.07.00.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit	8 Unit	94.844.950,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	15 Unit	113.813.940,00	BAPPEDA
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100%	100%	192.248.767,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	100%	523.044.659,00	

								Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Birokrasi				
5.01.01.2.08.00.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	95.456.535,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	12 Laporan	371.826.680,00	BAPPEDA
5.01.01.2.08.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	84.871.100,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	12 Laporan	93.358.210,00	BAPPEDA
5.01.01.2.08.00.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	11.921.132,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	12 Bulan	57.859.769,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	75%	75%	224.868.840,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	75%	169.341.524,00	

								Penyelundupan					
5.01.01.2.09.00.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	6 Unit	131.598.840,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	6 Unit	145.405.524,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09.00.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	31 Unit	21.760.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	40 Unit	23.936.000,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09.00.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	71.510.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Bappeda Kabupaten Bangka (Laki-laki 23 Orang, Perempuan 20 Orang)	-	0,00	BAPPEDA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				776.408.000,00							702.802.800,00	
		Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100							100		

		<i>Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah</i>	100	100							100		
		<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%							100%		
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	100%	100%	483.260.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	372.090.000,00	
		Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi	100%	100%							100%		
		Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%	100%							100%		
5.01.02.2.01.001	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5 Dokumen	1 Dokumen (Rancangan Awal RKPD)	24.150.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 Dokumen (Rancangan RKPD)	26.565.000,00	BAPPEDA

								dan Penyelundupan	Birokrasi				
5.01.02.2.01.00 02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	54.300.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 Dokumen	59.730.000,00	BAPPEDA
5.01.02.2.01.00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Berita Acara	2 Berita Acara (BA Konsul Publik RKPDP dan Konsul Publik RPJMD)	39.060.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 Berita Acara (BA Konsul Publik RKPDP)	31.248.000,00	BAPPEDA
5.01.02.2.01.00 04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	1 Berita Acara LPD RKPDP	28.170.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 BA LPD RKPDP	30.987.000,00	BAPPEDA
5.01.02.2.01.00 05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Nasional yang diikuti jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	2 Berita Acara (BA Musrenbang RPJMD, dan BA Musrenbang RKPDP)	114.590.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 Berita Acara (BA Musrenbang RKPDP)	107.631.000,00	BAPPEDA

5.01.02.2.01.00 07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8 Dokumen	3 Dokumen (RPJMD, RKPD, Perubahan RKPD)	222.990.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	2 Dokumen (RKPD dan Perubahan RKPD)	115.929.000,00	BAPPEDA
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	115.180.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	134.948.000,00	
	Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	100%	100%	100%									
	Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	100%	100%	100%									
5.01.02.2.02.00 01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	59.700.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	3 Dokumen	71.170.000,00	BAPPEDA
5.01.02.2.02.00 02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	204 Orang	68 Orang	55.480.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya,	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	68 Orang	63.778.000,00	BAPPEDA

								<i>Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan</i>	<i>Penguatan Kapasitas Birokrasi</i>				
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%	177.968.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	195.764.800,00	
		Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%							100%		
5.01.02.2.03.00.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	408 Laporan	136 Laporan	96.528.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	136 Laporan	106.180.800,00	BAPPEDA
5.01.02.2.03.00.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	3 Laporan	81.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	3 Laporan	89.584.000,00	BAPPEDA
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				152.750.000,00							214.720.000,00	

		<i>Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>							<i>100</i>		
5.01.03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	100%	100%	55.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	76.560.000,00	
5.01.03.2.01.00.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15 Laporan	5 Laporan	55.500.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	5 Laporan	76.560.000,00	BAPPEDA
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA,	100%	100%	37.050.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	56.430.000,00	

		<i>Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>							<i>100%</i>		
		<i>Indeks Inovasi Daerah</i>	<i>90,21</i>	<i>90,21</i>							<i>90,21</i>		
5.05.02.2.01.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/ Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	100%	100%	108.030.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	118.833.000,00	
<i>5.05.02.2.01.00.12</i>	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</i>	<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>108.030.000,00</i>	<i>Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung</i>	<i>Dana Alokasi Umum</i>	<i>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan</i>	<i>Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi</i>	<i>Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>118.833.000,00</i>	<i>BAPPEDA</i>
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	100%	100%	113.590.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	100%	124.949.000,00	

5.05.02. 2.04.00 01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1 Dokumen	113.590.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya, Penguatan Kapasitas Birokrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dan Stakeholder	1 Dokumen	124.949.000,00	BAPPEDA
					6.943.644.080,00							7.301.053.094,00	

BAB V PENUTUP

Renja Bappeda Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Bappeda Tahun 2026 disusun mengacu kepada Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mempedomani Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka nomor : B-000.7.5/116/Bappeda-V/2025 yang memuat batasan pagu Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 memuat rencana operasional pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 melalui pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan 4 (empat) program dengan total pagu anggaran mencapai Rp. 6.943.644.080,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah).

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah perubahan target output beberapa sub kegiatan Bappeda pada tahun 2026 sebagai respons terhadap hasil pilkada serentak di Kabupaten Bangka pada tahun 2024. Tahapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang semula direncanakan pada tahun 2025 ditunda pelaksanaan hingga tahun 2026 menunggu kepala daerah terpilih ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Bappeda serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda Kabupaten Bangka wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2026 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala.
3. Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 mencakup :

1. Penyusunan Anggaran Bappeda Tahun 2026 dengan mengacu kepada Renja Bappeda tahun 2026.
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.
3. Seluruh aparatur Bappeda Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Renja Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sungailiat, 08 Agustus 2025

Kepala Bappeda Kab. Bangka



Pan Budi Marwoto, M.Si

NIP. 19661214 199203 1 004

LAMPIRAN



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1308 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta menetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

B. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/1308/BAPPEDA/2024
TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sri Yulisafildiana, S.AP	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Tedy Heryawan, SE	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sufandi, A.Md	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ikhsan Arfani	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Ervin Septiawan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Rizki Amiliasari	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Yusnila Sari, S.Si	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Sulfiana, S.AB	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan/Angga Hidayatullah Eza, S.Si	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII. KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII. KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Suharpin	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Meggi	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Uci Oktariza	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Novela Sumalia	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Misleni Indah Purwati	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR



**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024 - Minggu I Februari 2025	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2024	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2025		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	14-25 Januari 2025		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	3-13 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua Februari 2025	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	14 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2025	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	17-28 Februari 2025		Seluruh PD
8	Input Rancangan Renja PD ke SIPD	17 Februari - 7 Maret 2025	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda	Input Rancangan Renja PD ke SIPD
9	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25-27 Februari 2025	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Perangkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	10-14 Maret 2025		Bappeda dan Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	9 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir Renja PD	9 Juli 2025		Bappeda

13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	10-15 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	16-23 Juli 2025	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Reviu Ranhir Renja PD oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut oleh PD	24 Juli-5 Agustus 2025		Inspektorat dan Seluruh PD
16	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	6-7 Agustus 2025		Bappeda
17	Penetapan Renja PD melalui Perbup	8 Agustus 2025	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda

**TABEL VERIFIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BANGKA**

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2026 RENSTRA PD 2024-2026	TARGET P-RENJA PD TAHUN 2025	TARGET RENJA 2026
I.		SS :						
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	NILAI ASPEK KINERJA PERENCANAAN DALAM AKIP DAERAH	Nilai	23,83	25,25	24,75	25,25
A.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	SP 1						
		<i>Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	Indeks	100	100	100	100
1	<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	SK 1.1						
		<i>Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan</i>	<i>Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan</i>	Persen	100	100	100	100
		SK 1.2						
		<i>Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunanan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi</i>	<i>Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi</i>	Persen	100	100	100	100
		SK 1.3						
		<i>Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunanan daerah dengan dokumen perencanaan daerah lainnya</i>	<i>Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)</i>	Persen	100	100	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	SP 2						
		<i>Meningkatnya pemenuhan data perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah</i>	Indeks	100	100	100	100
2	<i>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	SK.2.1						
		<i>Meningkatnya data sektoral bidang infrastruktur dan kewilayahan yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan</i>	Persen	100	100	100	100
		SK.2.2						
		<i>Meningkatnya data sektoral bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia</i>	Persen	100	100	100	100
		SK.2.3						
		<i>Meningkatnya data sektoral bidang ekonomi dan SDA yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA</i>	Persen	100	100	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	SP 3						
		<i>Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti</i>	Persen	100	100	100	100
3	<i>Kegiatan Pengendalian,</i>	SK.3.1						

	Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100
		SK.3.2						
		Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100
B	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SP 4						
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks	100	100	100	100
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	SK.1.1 Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPd dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	Persen	100	100	100	100
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	SK.2.1 Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPd dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	Persen	100	100	100	100
3	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	SK.3.1 Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan bidang Infrastruktur dan Wilayah (RPJMD dengan RENSTRA, RKPd dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	Persen	100	100	100	100
C	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SP 5						
		Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	SK.1.1 Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Persen	100	100	100	100
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	SK.2.1 Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Persen	100	100	0	0
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	SK.3.1 Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Persen	100	100	0	0
	PROGRAM PENELITIAN	SP 6						

	DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Kerjasama Kelitbang dalam Menciptakan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	88,78	80,61	90,21	90,21
4	<i>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	SK.4.1 <i>Meningkatnya Inovasi Daerah Yang Diimplementasikan Oleh PD</i>	<i>Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan</i>	<i>Persen</i>	<i>89,24</i>	<i>94,75</i>	<i>94,75</i>	<i>100</i>
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SP 7						
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	30,00	30,00	30,00	30,00
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai	15,00	15,00	15,00	15,00
1	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	SK.1.1 <i>Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar</i>	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
			<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SP 8						
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persen	0	0	0	0
2	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	SK.2.1 <i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SP 9						
		Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks	79,34	70	79,5	79,54
3	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	SK.3.1 <i>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai</i>	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		SK.3.2 <i>Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		SK.3.3 <i>Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	<i>Persen</i>	<i>71,88</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SP 10						
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	4	4	4	4
4	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	SK.4.1 <i>Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
5	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	SK.5.1 <i>Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SP 11						
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100%	100%	100%	100%
6	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	SK.6.1 <i>Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja</i>	<i>Persentase penambahan aset perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>1,23</i>	<i>4,78</i>	<i>4,56</i>	<i>4,56</i>